

**AKIBAT HUKUM PENCURIAN DANA KARTU KREDIT
MELALUI PEMBELANJAAN DI INTERNET**

**Studi Kasus Tentang Penyidikan Dan Pembuktian Di Polisi
Daerah Jawa Timur**

SKRIPSI



Oleh:

MOCH. TAUFIK ILMA DENI HIDAYAT
NPM.0671010053

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

**AKIBAT HUKUM PENCURIAN DANA KARTU KREDIT
MELALUI PEMBELANJAAN DI INTERNET**

**Studi Kasus Tentang Penyidikan Dan Pembuktian Di Polisi
Daerah Jawa Timur**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

MOCH. TAUFIK ILMA DENI HIDAYAT
NPM.0671010053

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENCURIAN DANA KARTU KREDIT MELALUI
PEMBELANJAAN DI INTERNET**

**Studi Kasus Tentang Penyidikan Dan Pembuktian Di Polisi Daerah Jawa
Timur**

Disusun Oleh:

MOCH. TAUFIK ILMA DENI HIDAYAT
NPM.0671010053

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Indrati Rini, SH, MS
NIP. 130 936 179

Sutrisno, SH., Mhum
NIP. 030 193 492

Mengetahui,

A.n Dekan Wadek I

Haryo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 030 212 027

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM PENCURIAN DANA KARTU KREDIT MELALUI
PEMBELANJAAN DI INTERNET
Studi Kasus Tentang Penyidikan Dan Pembuktian Di Polisi Daerah Jawa
Timur

Oleh:

MOCH. TAUFIK ILMA DENI HIDAYAT
NPM.0671010053

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 21 Juni 2010

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1. <u>Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S.</u>
NIP. 130 936 179 | (_____) |
| 2. <u>Sutrisno, SH.,Mhum.</u>
NIP. 030 193 492 | (_____) |
| 3. <u>Haryo Sulistiyantoro, SH.,MM</u>
NIP. 030 212 027 | (_____) |

Mengesahkan,
D E K A N

Haryo Sulistyanoro, S.H., M.M.
NIP. 196206251991031 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Moch. Taufik Ilma Deni Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 09 Oktober 1987
NPM	: 0671010053
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Anusanata 76 B Gedangan Sawotratap. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun dengan judul: *“AKIBAT HUKUM PENCURIAN DANA KARTU KREDIT MELALUI PEMBELANJAAN DI INTERNET Studi Kasus Di Polisi Daerah Jawa Timur”* dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan atau plagiat. -----

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini dicurigai sebagai hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan. Dan apabila Pengadilan telah memberikan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dimana isinya menyatakan bahwa skripsi ini adalah secara sah dan meyakinkan merupakan hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh. -----

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya. -----

Mengetahui
Ketua Program Studi

Surabaya, 14 Juni 2010
Penulis

Subani, S.H., M.Si
NIP. 030 174 635

MOCH. TAUFIK ILMA DENI HIDAYAT
NPM.0671010053

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian.....	6
4.....	M
manfaat Penelitian	6
5..... Kajian Pustaka	7
a. Cyber Spase, Cyber Crime, Cyber Law	7
b. Internet.....	9
c. Transaksi Elektronik.....	9
d. Kartu Kredit	9
e. Penyelidik dan Penyelidikan, Penyidik dan Penyidikan	10
f. Pembuktian	10
g. Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	12
h. Pengaturan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Dan Upaya Hukum Korban Kejahatan <i>carding</i>	14
6.....	M
etode Penelitian	15
a..... Jenis dan Tipe Penelitian	15

b.....	Sumber Data	16
c.....	Metode Pengumpulan Data	17
e.....	Metode Pengolahan Data	17
f.	Metode Analisis Data	17
7.	Lokasi Penelitian	17
8.	Waktu Penelitian	18
9.	Jadwal Penelitian.....	18
10.	Anggaran Penelitian.....	19

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Fenomena *cyber crime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang pada khususnya memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *cyber crime*. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi, khususnya akademisi hukum. Hal ini sangat dirasa sekali saat mahasiswa Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JAWA TIMUR menyelenggarakan seminar nasional mengenai dampak *cyber crime* dan sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dibaca UU ITE).

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori mengatakan: "*crime is a product of society its self*", yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya peneliti mencoba telusuri dan kaji mengenai *cyber crime* khususnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Kasus yang muncul kepermukaan dan diketahui oleh

publik pada umumnya adalah berdasarkan laporan akan terungkapnya para pelaku *cyber crime* atau laporan dari korban *cyber crime* akan kerugian yang dialaminya. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus yang menunjukkan tindakan *cyber crime* di kota Surabaya;

Kasus yang berhasil dibongkar IDIK IV Reserse Kriminal Polwiltabes Surabaya, tanggal 03 Juli 2005. Chandra Halim, 42, warga Kalijudan Asri Surabaya seorang pembobol bank dengan kartu kredit, terungkap kerugian yang dialami 10 bank dan dua lembaga pengeluar kartu kredit lain mencapai Rp 33,6 miliar. Yakni Bank Danamon, Niaga, ANZ, HSBC, BNI, Mandiri, BII, *Standard Chartered Bank*, Permata, Citibank, GE *Extra Master Card*, serta kartu belanja *Carrefour*. Chandra Halim diamankan polisi di kompleks ruko Rungkut Megah Raya, Kalirungkut, Minggu (3/7) malam.¹

UU ITE masih memiliki kelemahan salah satunya belum mencakup masalah operasional perbankan khususnya kegiatan perbankan yang memiliki potensi kejahatan dunia maya antara lain adalah layanan online shopping (berbelanja secara *online*) yang memberikan fasilitas pembayaran melalui kartu kredit (*credit card fraud*). Jenis kejahatan ini muncul akibat kemudahan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit yang diberikan *online shop*. “Modusnya ialah pelaku menggunakan nomor kartu kredit korban untuk berbelanja di *online shop*”.²

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian semua

¹ *Info Kasus Pencurian kartu kredit di Surabaya*, diakses dari www.bi.go.id/Info-found.htm, Pukul 19.00, Sabtu, Tanggal 22 Mei 2010.

² Eddy O.S Hiariej, *Hukum dan Teknologi*, UGM Jogjakarta, November 2005, Hal. 22-23

transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak, dengan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Kondisi seperti dijelaskan diatas tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena “Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet.”³ Sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional / biasa.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan

³ Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Buku Panduan Untuk Memahami UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, Hal. 93

demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi ini.

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, Pihak kepolisian melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 butir 13 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab – sebab tindak pidana tersebut. Informasi biasanya didapat dari NCB / Interpol yang menerima surat pemberitahuan atau laporan dari negara lain yang kemudian diteruskan ke Unit *cybercrime* / satuan yang ditunjuk. Dalam teknik pembuktian aparat kepolisian perlu diteliti karena peristiwa pencurian dana kartu kredit terjadi di dunia maya yang dimana bukti - buktinya tidak bisa disentuh, diraba, dirasa, tetapi benda ini hanya bisa dilihat, diukur satuannya, dan diproses lebih lanjut juga dengan menggunakan komputer.

Dalam modusnya antara korban dan pelaku tidak pernah melakukan kontak secara fisik karena peristiwa tersebut terjadi di dunia maya, namun kerugian yang ditimbulkan adalah nyata. Selain itu dalam kenyataannya kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak dibatasi oleh teritorial suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun.

Dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan “modus operandi yang canggih sehingga dalam proses beracara diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap suatu kejahatan.”⁴

Berkaitan dengan hal tersebut perlunya penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Pencurian Dana Kartu Kredit Melalui Pembelanjaan di Internet Studi Kasus Tentang Penyidikan Dan Pembuktian di Polisi Daerah Jawa Timur.”

2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasar uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa tindakan operasional Polisi Daerah Jawa Timur dalam penyidikan pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet?
- b. Bagaimana upaya-upaya Polisi Daerah Jawa Timur dalam pembuktian pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet?
- c. Apa upaya hukum korban pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

- a. Untuk menganalisis tindakan operasional Polisi Daerah Jawa Timur dalam penyidikan pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.
- b. Untuk menemukan dan menganalisis upaya-upaya Polisi Daerah Jawa.

⁴ Krisnawati, “et all”, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, 2006, Pena Pundi ksara, Jakarta, hlm. 3

Timur dalam pembuktian pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

- c. Untuk menemukan dan menganalisis upaya hukum korban pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis :

Manfaat secara khusus yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis :

- (1) Bagi pihak-pihak yang berperkara

Menambah pengetahuan mengenai tindakan operasional penyidikan dan upaya pembuktian yang berkaitan dengan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya mengenai pencurian kartu kredit melalui pembelian di internet, hingga upaya hukum yang dapat ditempuh.

- (2) Bagi Kepolisian

- 1) Agar tetap konsisten dalam memecahkan permasalahan hukum berdasarkan kebenaran agar dapat tercapainya suatu keadilan.
- 2) Agar selalu meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan khususnya pencurian kartu kredit melalui pembelian di internet.

5. Kajian Pustaka

a. Cyber crime

Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. **The U.S. Department of Justice** memberikan pengertian *computer crime* sebagai: "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution". Pengertian lainnya diberikan oleh **Organization of European Community Development**, yaitu: "any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data". **Andi Hamzah** dalam bukunya *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer* (1989) mengartikan: "kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal".

Dari beberapa pengertian di atas, *computer crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *computer crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih (Wisnubroto, 1999).⁵

Menurut Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer didalam internet disebut

⁵ Pengertian *Cyber crime* menurut ahli hukum. Data kasus diakses dari www.simandiri.com/site/ket.definisi.php?p=cybercrime, Pukul 19.00, Sabtu, Tanggal 22 Mei 2010.

cyber crime. ⁶

b. Cyber Space

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. ⁷

c. Cyber Law

Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. *Cyberlaw* dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah "ruang dan waktu". Sementara itu, Internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini. ⁸

d. Internet

Internet adalah Sistem informasi global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer secara bersama-sama dalam suatu ruang global berbasis Internet Protocol. Internet merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *orlwide network*. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. ⁹

e. Transaksi Elektroik

UU ITE Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan

⁶ Tb. Ronny R. Nitibaskara, "*Problema Yuridis Cybercrime*", Makalah pada Seminar *Cyber Law*, diselenggarakan oleh yayasan Cipta BAngsa, Bandung, Juli 2000, p. 2.

⁷ Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Buku Panduan Untuk Memahami UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, hal. 94 - 95

⁸ Tb. Ronny R. Nitibaskara, op.cit., 2000, p. 4.

⁹ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990. Hal. 86

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Penjelasan transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.

f. Kartu Kredit

Pengertian kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰

g. Penyidik, Penyidikan dan Penyelidik, Penyelidikan

Penyidik (pasal 1 butir 1 KUHAP) : “Penyidik adalah pejabat polisi Negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidikan (pasal 1 butir 2 KUHAP) : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit, (Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal.11

tersangkanya”.

Penyelidik (Pasal 1 butir 4 KUHAP) : “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan”. Penyelidikan (pasal 1 butir 5 KUHAP) : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

h. Pembuktian

(1) Pasal 1 angka 4 UU ITE :

Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,
atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronimagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

(2) Pasal 5 ayat (3) UU ITE :

Dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Pasal 6 UU ITE :

Dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

(4) Pasal 7 UU ITE :

Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasar adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirim, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Kemudian saksi ahli harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (5) huruf h dimana penyidik berwenang meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasar Undang – Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

i. Kepentingan Korban Kejahatan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Secara teoritis dan praktik sistem Peradilan di Indonesia kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan

Masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*).¹¹

Secara Umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu *Pertama*, model hak – hak prosedural (*the action system*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh **Jan JM Van Dijk, The Hague**, bahwa : “*Historically this has been the main justification for the establishment of the office the public prosecutor*”.¹²

Kedua, Model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila dianalisis, ternyata baik model hak – hak prosedural maupun model pelayanan masing – masing mempunyai kelemahan. Model

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, Hal. 78

¹² H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 63

hak – hak prosedural dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain hal diatas, yang menetapkan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban maka sering dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidak puasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dikarenakan secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.¹³

Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidanaanya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak memohon hukuman yang seringan – ringannya, atau kalau memungkinkan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim yang berupa pemidanaan (*veroordeling*) haruslah pula mengandung anasir yang bersifat

¹³ H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban KEjahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 6

kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Tegasnya, mengandung unsur *moral justice, sosial justice* dan *legal justice*.

j. Pengaturan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif dan Upaya Hukum Korban Kejahatan *carding*

Pasal 31 UU ITE

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak yang menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

6. Metode Penelitian

a. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁴

Tipe penelitian studi kasus, ”studi kasus merupakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti”.¹⁵

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Terdiri dari :
 - a) KUHPidana dan KUHP (R. Soenarto Soerodibroto, S.H.)
 - b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal.13

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesial, Jakarta, 1986, Hal.16

bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur website, hasil karya sarjana. Terdiri dari:

- Buku-buku tentang hukum pidana
- Buku-buku tentang cyber crime
- Buku-buku tentang Penelitian Hukum
- Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif
- Handout-handout mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum
- Dokumen-dokumen di Kepolisian

3) Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya. Yaitu kamus hukum.¹⁶

c. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku dan dari sumber-sumber data sekunder, *“Such documents not only describe contemporary events, bu also help to reveal how these events have appeared to those living thourgh them”*.¹⁷

d. Metode Pengolahan Data

Metode dalam pengolahan data ini adalah Editing, yaitu memeriksa atau membenarkan data agar dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

e. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Pengertian metode

¹⁶ *Ibid*, h.13

¹⁷ Indrati Rini, *Handout Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JAWA TIMUR, 2009

¹⁸ *Ibid*

kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah "suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata...".¹⁹

7. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, latar belakang masalah ini adalah dasar dari pemilihan judul skripsi, setelah didapatkan permasalahan maka dimasukkan ke dalam rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan. Di dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, metodologi, lokasi dan waktu penelitian. Agar keempat bagian tersebut dapat digunakan dalam menentukan arah dari skripsi ini. Dengan maksud apa yang akan dikonsepskan dapat terarah dengan jelas. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang berguna untuk meringkas poin yang ada didalam skripsi.

BAB II, berisi tentang tindakan operasional Polisi Daerah Jawa Timur dalam penyidikan pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

BAB III, berisi tentang upaya-upaya Polisi Daerah Jawa Timur dalam pembuktian pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

BAB IV, berisi tentang upaya hukum korban pencurian dana kartu kredit

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, h.250

melalui pembelian di internet.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dibahas dalam BAB II, BAB III, BAB IV, dan saran.